RENCANA AKSI ATAS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2023
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

1 Link Data Dukung Tindak Lanjut SAKIP (link google drive / cloud yang berisi data dukung tambahan SAKIP (yang tidak terakomodir di esr) : **Link google drive tertera dalam lampiran excel dibawah**

2 Nama Penanggung Jawab Data SAKIP/Unit Kerja : **BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN**

3 Nomor HP Penanggungjawab Data SAKIP : **082148743000**

NO	HASIL EVALUASI	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT
A	**Perencanaan Kinerja**		
1	Belum seluruh rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja pada perencanaan Instansi Pemerintah memenuhi kriteria SMART *(Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-Bound)* serta cukup untuk mengakomodir tujuan dan sasaran strategis;	1 Melakukan perbaikan dokumen perencanaan pada setiap tingkat organisasi dengan memperhatikan berbagai kaidah dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja seperti memastikan tujuan dan sasaran strategis telah berorientasi hasil *(result oriented)* , serta memastikan kualitas indikator kinerja agar memenuhi kriteria yang SMART *(Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-Bound)* terutama pada kriteria spesifik, relevan dan terukur;	1 Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah: - Pemerintah Daerah telah menyusun Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2025-2045 - Pemerintah Daerah akan menyusun rancangan teknokratik RPJMD Kabupaten Balangan tahun 2025 - 2029 - Penyusunan dokumen perencanaan pemerintah daerah Kabupaten Balangan (RPJPD dan RPJMD) disusun dengan memperhatikan tujuan dan sasaran strategis berorientasi hasil (result oriented), serta memastikan kualitas indikator kinerja agar memenuhi kriteria yang SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-Bound) terutama pada kriteria spesifik, relevan dan terukur. - Pohon kinerja hasil asistensi dengan Kemenpanrb dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pemerintah daerah 2 Dokumen Perencanaan SKPD : SKPD telah melakukan penyesuaian renstra berdasarkan cascading hasil asistensi dengan Kemen PANRB
2	Pemerintah Kabupaten Balangan telah menyusun penjenjangan kinerja dengan berpedoman pada Permen PANRB 89 Tahun 2021. Namun penjenjangan yang dilakukan masih perlu dilakukan penyempurnaan, utamanya pada kinerja pada level taktikal yang belum sepenuhnya menggambarkan hubungan sebab akibat serta memiliki rumusan kinerja yang sama/redundant dengan kinerja di atasnya;	2 Menyempurnakan penjenjangan kinerja yang telah disusun dengan memastikan penjabaran hubungan sebab akibat antar jenjang kinerja sedari level strategis hingga ke operasional sehingga bisa menggambarkan bagaimana keterlibatan setiap individu dalam mendukung kinerja organisasi;	1 Sebanyak 30 (Tiga Puluh) SKPD telah dilakukan Asistensi Pohon Kinerja dan Cascading bersama Kementerian PAN RB dan telah memastikan penjabaran hubungan sebab akibat antar jenjang kinerja sedari level strategis hingga ke operasional, sehingga bisa menggambarkan bagaimana keterlibatan setiap individu dalam mendukung kinerja organisasi 2 Ada beberapa SKPD yang perlu dilakukan reviu kembali pohon kinerja dan cascadingnya dengan Kementerian PANRB seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian, dan Dinas Sosial, PPPAPMD
3	Pemanfaatan pohon kinerja sebagai dasar untuk penyusunan dokumen perencanaan belum dilakukan, secara menyeluruh pada setiap Perangkat Daerah sehingga keselarasan antara pohon kinerja yang telah disusun dengan dokumen perencanaan yang ada belum tergambar dengan baik;	3 Mendorong pemanfaatan pohon kinerja yang telah disusun dengan menuangkannya ke dalam dokumen perencanaan, sehingga keselarasan antara pohon kinerja dan dokumen perencanaan dapat tergambar dengan baik;	1 Dokumen Perencanaan SKPD : SKPD telah melakukan penyesuaian renstra berdasarkan cascading hasil asistensi dengan Kemen PANRB
4	Aktivitas dalam Rencana Aksi yang disusun oleh beberapa Perangkat Daerah belum sepenuhnya relevan dan cukup untuk mendukung pencapaian kinerja utama pemerintah daerah.	4 Meningkatnya kualitas rencana aksi pada setiap Perangkat Daerah agar memuat aktivitas yang irrelevant dan cukup untuk mendukung pencapaian kinerja utama pada pemerintah daerah;	1 Melaksanakan asistensi dan monitoring evaluasi atas rencana aksi SKPD sebagai implementasi pencapaian target kinerja pada Perjanjian Kinerja dan LHE SAKIP melalui aplikasi e-kino dan manual.
B	**Pengukuran Kinerja**		
1	Sistem pengukuran kinerja unit kerja dan kinerja individu pegawai belum sepenuhnya terintegrasi sehingga berpotensi terjadi ketidaksesuaian antara kinerja unit kerja dengan kinerja individu pegawai;	5 Mengintegrasikan seluruh sistem pengukuran kinerja baik tingkat unit kerja dan individu pegawai sehingga akan terjaga kesesuaian antara kinerja unit kerja dan kinerja individu pegawai;	1 Melakukan penjajakan kerjasama dengan Pemerintah Kota Surabaya terkait implementasi integrasi Aplikasi (Replikasi Inovasi Aplikasi SAKIP) melalui zoommeeting dan studi lapangan replikasi ke Pemerintah Kota Surabaya

NO	HASIL EVALUASI	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT
B	**Pengukuran Kinerja**		
2	Dalam pengukuran data kinerja, masih terdapat data kinerja yang belum sepenuhnya andal untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan;	6 Memastikan kembali pengukuran kinerja yang dilakukan disertai dengan data yang relevan atau menggambarkan kondisi yang ingin dicapai sehingga data kinerja yang dihasilkan dari pengukuran capaian kinerja dapat diandalkan;	1 Melakukan Asistensi dan monitoring evaluasi capaian Pengukuran Kinerja yang telah dilaksanakan dengan data yang relevan
3	Setiap pegawai sudah merumuskan kinerja individu masing-masing yang tertuang pada sasaran kinerja pegawai (SKP), namun SKP yang disusun belum sepenuhnya memberikan gambaran kinerja individu yang menunjang pencapaian kinerja organisasi;	7 Memastikan perumusan kinerja individu setiap pegawai benar-benar terkait dengan kinerja organisasi yang tergambar pada matriks pembagian peran hasil kemudian memastikan hasil dari matriks tersebut dituangkan ke dalam SKP sehingga dapat dipastikan kinerja individu menunjang kinerja organisasi;	1 Melaksanakan coaching klinik penyusunan SKP berbasis pada Perjanjian Kinerja Individu dan asistensi kesesuaian antara kinerja organisasi dengan kinerja individu.
C	**Pelaporan Kinerja**		
1	Laporan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan sudah disertai dengan analisis cukup lengkap dengan melibatkan analisis ketercapaian, data pembanding (target realisasi, tahun sebelumnya, target jangka menengah), faktor hambatan/pendukung, solusi atas permasalahan, dan analisis efisiensi ketercapaian kinerja. Beberapa unit kerja memiliki informasi tersebut sebagai dasar pelaporan, namun ada juga yang tidak. Hal ini mengindikasikan implementasi standar pelaporan belum secara merata pada seluruh unit kerja;	8 Mengimplementasikan standar pelaporan kinerja berdasarkan Permenpan Nomor 53 Tahun 2024 secara merata pada setiap unit kerja dengan memastikan analisis yang lebih mendalam untuk dapat memberikan informasi deskripstif program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau mengakibatkan kegagalan dalam pencapaian kinerja;	1 Telah dilaksanakan Asistensi dengan Kementerian PANRB Atas Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Balangan sehingga Laporan Kinerja SKPD memberikan informasi deskripstif program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau mengakibatkan kegagalan dalam pencapaian kinerja
2	Informasi kinerja yang telah dituangkan dalam laporan kinerja pemerintah daerah dan unit kerja belum dimanfaatkan dengan baik, terutama pada proses penentuan target maupun strategi serta aktivitas dalam perencanaan tahunan untuk mendukung pencapaian kinerja ke depan.	9 Memanfaatkan informasi kinerja yang ada dalam laporan kinerja perangkat daerah maupun unit kerja sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan target, strategi serta aktivitas dan diharapkan agar dituangkan dalam dokumen perencanaan ke depan, sehingga dapat mendukung pencapaian kinerja kedepan, terkhusus kinerja yang memiliki realisasi rendah di tahun sebelumnya;	1 Memanfaatkan Informasi kinerja yang ada dalam laporan kinerja terutamapencapaian realisasi kinerja rendah sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan target, strategi serta aktivitas ke depan 2 LKIP dijadikan dasar penyusunan renja SKPD dan adanya kegiatan khusus tentang AKB menjawab permasalahan yang telah dikemukakan dalam LKIP Kabupaten dan SKPD
D	**Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**		
1	Pemerintah Kabupaten Balangan telah melakukan evaluasi internal kepada Perangkat Daerah, namun hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya mampu mendorong perbaikan dan peningkatan capaian kinerja pada level pusat, hal ini ditunjukkan dari masih terdapat sebagian kecil kinerja yang capaian target kinerjanya belum tercapai;	10 Mendorong hasil evaluasi akuntabilitas kinerja untuk dapat memberikan gambaran langkah-langkah perbaikan nyata untuk meningkatkan pencapaian seluruh target kinerja;	1 Telah Melakukan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Triwulan III tahun 2023 2 Melakukan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP triwulan IV 2023
2	Hasil evaluasi internal yang dituangkan dalam bentuk laporan hasil evaluasi belum memberikan temuan dan rekomendasi yang cukup dan menyasar secara langsung akar permasalahan yang dialami oleh Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan SAKIP.	11 Memastikan bahwa temuan dan rekomendasi yang diberikan saat evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar menggambarkan hal yang menjadi kekurangan dan memberikan solusi yang efektif yang perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas implementasikan SAKIP di setiap Perangkat Daerah;	1 Membuat Perbup Evaluasi AKIP 2 Melakukan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah 3 Membuat SOP Evaluasi AKIP

NO	HASIL EVALUASI	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT
E	**Akuntabilitas Kinerja Penanggulangan Kemiskinan**		
1	Berdasarkan data SIPD, besaran alokasi belanja dengan *tagging* penanganan kemiskinan ekstrem pada Pemerintah Kabupaten Balangan adalah sebesar Rp. 287.376.020.624 atau 13,90% dari total pos belanja APBD. Alokasi tersebut digunakan untuk membiayai 101 Sub Kegiatan;	12 Terkait dengan tema kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Balangan agar menyempurnakan pohon kinerja kemiskinan yang sudah disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lapangan yang menyebabkan kemiskinan di wilayah Kabupaten Balangan, sehingga dapat diketahui permasalahan kinerja mana saja yang perlu menjadi fokus utama dalam pengentasan kemiskinan;	1 Telah dilaksanakan penyempurnaan pohon kinerja kemiskinan pada program strategi pengurangan beban pengeluaran sesuai fokus utama dalam pengentasan kemiskinan.
2	Belanja terbesar penanganan kemiskinan ekstrem dialokasikan pada Sub Kegiatan "Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian" yaitu sebesar 27,26% dan terkecil adalah pada Sub Kegiatan "Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT" yaitu sebesar 0,33928%;	13 Mendorong keterlibatan seluruh *stakeholder* di wilayah Kabupaten Balangan, baik internal Pemda maupun eksternal, dengan berdasarkan informasi *crosscutting* dan strategi kinerja yang sudah disusun berdasarkan pohon kinerja kemiskinan yang dimiliki;	1 Melaksanakan rapat koordinasi TKPKD yang berfokus pada upaya kolaborasi pensasaran masyarakat miskin ekstrem dan miskin yang berdasarkan pada data P3KE dan dapat menghasilkan data sektoral SKPD khususnya Dinas Sosial, adanya inovasi SIAP PD sebagai alat yang mempermudah dalam intervensi dan berkoordinasi penanggulangan kemiskinan ekstrem.
3	Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikeluarkan pada September 2023, tingkat kemiskinan Kabupaten Balangan adalah sebesar 5,22% atau turun 0,61% dibandingkan dengan tahun 2022;	14 Pimpinan Daerah beserta Bappeda agar melakukan reviu atas seluruh program, kegiatan serta aktivitas yang ada beserta anggarannya dengan memanfaatkan pohon kinerja kemiskinan yang telah disusun, sehingga dapat diketahui sejauh mana perencanaan dan penganggaran yang telah direncanakan dapat berdampak dalam menurunkan kemiskinan.	1 Melaksanakan rapat koordinasi TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangah Kemiskinan Daerah) terkait akselerasi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem dengan monitoring evaluasi hasil intervensi per triwulan yang mengacu pada RAT Penanggulangan kemiskinan (Rencana Aksi Tahunan)
4	Hasil analisis tim evaluator masih menemukan banyaknya sub kegiatan yang tidak terkait langsung dengan kemiskinan ekstrem, serta alokasi anggaran pendukung (konsumsi rapat, biaya operasional, perjalanan dinas dan lainnya) yang masih cukup besar.		1 Optimalisasi monitoring dan evaluasi setiap triwulan pelaporan kemiskinan ekstrem dengan memberi kolom belanja spesifik sehingga terlihat jumlah belanja spesifik sebagai bahan analisa percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem ditahun berikutnya

a.n. BUPATI BALANGAN
SEKRETARIS DAERAH,

H. SUTIKNO, AP, M.AP
Pembina Utama Madya
NIP. 19760417 199412 1 001